

**OPTIMASLISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF  
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK  
(STUDI DI KALIMANTAN BARAT)**

**BAHARUDDIN.N. SH. Sip  
A21211066**

**ABSTRACT**

This thesis focuses on optimizing the role of political parties in the political participation of the people in the legislative elections by Act No. 2 of 2008 on Political Parties in which the study was conducted in West Kalimantan . From the authors of a study using normative legal research methods , obtained kesimpulan1 ) . political parties have not been optimized to improve the community in any political partisipasipasi legislative elections held due to a ) . egocentric and arrogant political parties . b ) , inadequate political education . c ) . Improper political recruitment . d ) . Momentary interests of political parties . Based on the survey results that there is known that the low political participation of the people in the legislative election caused by factors include the following : a ) . Society made an object not subyek.b ) . Representatives of deviant behavior . c ) . There is no direct benefit from the election . d ) . Election is right rather than an obligation . 2 ) . in West Kalimantan seems to be no significant movements that directly touch the emotional awareness and political consciousness that legislative elections be a most important part in the life of the nation . Political parties do not have a clear vision and strategy in an effort meningkatkan political partisipsi society . Most political parties existing center in West Kalimantan only do two (2 ) things : First ; political parties only preoccupied with his own party , be it the consolidation and completion of internal conflict within the party as well as the determination of candidates ahead of legislative elections . Second, briefing - debriefing against its cadres intended for its own sake and for the party to gain as many votes and seats in representative institutions in which people become objects solely .

## ABSTRAK

Tesis ini menitikberatkan pada optimalisasi peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dimana studi dilakukan di Kalimantan Barat. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan<sup>1</sup>). partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan disebabkan a). egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut : a). Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek. b). Penyimpangan perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak bukannya kewajiban. 2). di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : **Pertama**; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu konsolidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. **Kedua**; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

## **A. Latar belakang Penelitian**

Perubahan fundamental pada sistem ketatanegaraan di Indonesia dimulai dengan keberhasilan lembaga MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Langkah-langkah konstitusional dari lembaga representatif rakyat tersebut dengan mengadakan suatu perubahan dan pergeseran tatanan kehidupan bernegara. Setidak-tidaknya lembaga-lembaga negara banyak yang mengalami perubahan bahkan meniadakan lembaga negara tersebut karena secara substansi kewenangan sudah tidak diperlukan lagi. DPR sebagai suatu lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memang harus tetap ada dalam sebuah negara yang demokratis. Kehadiran DPR merupakan jawaban dari sebuah peradaban demokratis yang menuntut adanya pengawasan kinerja dari pihak pemegang kekuasaan yakni pemerintah, agar tercipta suatu tatanan kehidupan bernegara yang dapat mewujudkan cita-cita dari sebuah negara welfare state.

Kedudukan lembaga DPR pada hakekatnya berbanding lurus dengan keberadaan partai politik. Partai politik merupakan sebuah lembaga yang diberikan wewenang untuk mencari sumber-sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk ditempatkan di lembaga DPR dan jabatan-jabatan politis seperti Kepala daerah. Esensinya sebuah partai politik merupakan wahana untuk menciptakan kader-kader yang terbaik untuk meraih kekuasaan pada satu lembaga negara dan pemerintahan. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia telah mengalami pasang surut, kehidupan politik era reformasi telah memunculkan banyak partai politik dalam kancah politik nasional. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia sedang menjalani transisi politik menuju perubahan besar dalam berdemokrasi. Kehidupan multi partai dewasa ini mengandung dua implikasi; disamping dapat memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses politik karena memang substansi demokrasi adalah kesetaraan politik, namun stabilitas politik nasional menjadi rentan karena suara rakyat yang menjadi sumber kekuasaan politik terpecah.

Meskipun demikian, dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggungjawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran partai politik di tengah-tengah kehidupan masyarakat sejatinya memberikan pencerahan tentang arti penting proses demokrasi sebagai media meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehadiran partai politik menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat.

Dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 dinyatakan bahwa tujuan dan fungsi partai politik adalah Tujuan Umum yaitu; a). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang b). menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c). mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia d) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Selanjutnya Tujuan Khususnya adalah a). meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan b). memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara c). membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada sisi lain fungsi dari partai politik adalah a). pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b). penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. c). penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. d). partisipasi politik warga negara Indonesia e). rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Salah satu tujuan dan fungsi partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat. Partisipasi<sup>1</sup> diartikan sebagai orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Oleh karena itu, partisipasi politik secara umum dapat dinyatakan sebagai orang-orang yang berperan serta dalam kegiatan politik. Kegiatan politik tentu mempunyai keanekaragaman dari sisi bentuk dan substansi, salah satu kegiatan politik adalah partisipasi politik masyarakat pada saat menjalankan hak dan kewajibannya untuk memilih para wakil rakyat melalui pemilu legislatif baik legislatif tingkat pusat maupun pada tingkat daerah serta pemilu kepala daerah. Partisipasi politik masyarakat menjadi indikator penentu untuk melihat keberhasilan dari suatu kegiatan politik yang telah diagendakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah.

Terkait dengan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilu, dari data statistik partisipasi pemilih dari 10 kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan di

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005.)

Indonesia sejak tahun 1955-2009 yang diolah dari data KPU Menunjukkan Pemilu Legislatif Tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa orde baru yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi yang mencapai angka 96,62 persen. Sedangkan yang terendah adalah Pemilu Legislatif 2004, yang mencapai angka 84,07 persen. Sebagai gambaran, Pemilu 1955 dengan pemilih terdaftar sebanyak 43.104.464 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 91,41 persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmosfir kebersamaan sebagai bangsa dan negara baru masih dirasakan sehingga fenomena golput belum muncul dan motif yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang signifikan.

Pemilu 1971, merupakan pemilu pertama pada masa orde baru dengan pemilih terdaftar sebanyak 58.558.776 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,62 persen. Pemilu 1977 dengan pemilih terdaftar sebanyak 69.871.092 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,52 persen. Pemilu 1982 dengan pemilih terdaftar sebanyak 82.132.195 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,47 persen. Pemilu 1987 dengan pemilih terdaftar sebanyak 93.737.633 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 96,43 persen. Pemilu 1992 dengan pemilih terdaftar sebanyak 107.565.413 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 95,06 persen. Pemilu 1997 dengan pemilih terdaftar sebanyak 125.640.987 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 93,55 persen. Pemilu 1999 dengan pemilih terdaftar sebanyak 118.158.778 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 92,74 persen. Pemilu Legislatif 2004 dengan pemilih terdaftar sebanyak 148.000.369 jiwa dengan partisipasi pemilih mencapai 84,07 persen, dan pada pemilu legislatif 2009 partisipasi pemilih mencapai 70,09 persen.

Data-data statistik di atas merupakan gambaran untuk mengindikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif tidaklah terlalu signifikan untuk dapat dikatakan partisipasi politik masyarakat cukup tinggi, artinya rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi bagian dari tanggungjawab partai politik jika dikaitkan dengan tujuan dan fungsi partai politik sebagaimana yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Kecenderungan akan semakin rendahnya partisipasi politik masyarakat pada setiap kegiatan politik, tentu akan membawa dampak yang tidak baik pada kehidupan demokrasi yang akan dibangun.

Dari uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “OPTIMASLISASI PERAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI DI KALIMANTAN BARAT).

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa partai politik belum optimal dalam menjalankan tujuan dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif di Kalimantan Barat.
2. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh partai politik dalam menjawab persoalan terhadap rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Kalimantan Barat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partai Politik Belum Optimal Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Dalam Pemilu Legislatif.**

Pentingnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan:

#### **1. Egosentris dan arogansi partai politik**

Partai politik selalu mengatakan bahwa partainya merupakan partai yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi dimasyarakat, indikatornya selalu mengandalkan hasil survei lembaga-lembaga penelitian yang ada tentang elektabilitas partai. Disadari atau tidak arogansi dan keegoan partai muncul, seharusnya seluruh partai yang ada kembali kepada peran dan tujuan partai itu sendiri sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, bukan merasa dirinya besar karena hasil survey yang diwakili oleh sebagian kecil masyarakat dan mampu menempatkan jumlah relatif banyak dikursi lembaga perwakilan rakyat. Data-data yang ada menunjukkan persentase pemilih lebih kecil dibanding dengan yang tidak memilih, artinya masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan partai dan kehadiran partai dan itu menandakan lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh orang-orang partai tidak mencerminkan seutuhnya lembaga perwakilan rakyat itu sendiri.

2. pendidikan politik yang tidak memadai.

Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilu legislatif membuktikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol sama sekali tidak optimal. Hampir tidak pernah ada parpol yang secara sistematis dan terstruktur memberikan pendidikan dan pencerahan politik bagi masyarakat. Masyarakat hanya disuguhkan pada pertikaian-pertikaian antar parpol yang akhirnya tidak membawa kemajuan melainkan menimbulkan apatisme dan pesimisme yang berakhir pada ketidakpedulian masyarakat itu sendiri terhadap parpol.

3. Rekrutmen politik yang tidak tepat.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilamana dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun bila dikaji secara sekilas sampai dengan saat inipun proses rekrutmen politik belum berjalan secara terbuka, transparan, dan demokratis yang berakibat pemilihan kader menjadi tidak obyektif. Proses penyiapan kader juga terkesan tidak sistematis dan tidak berkesinambungan. Partai politik dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya lebih intens hanya pada saat menjelang adanya event-event politik.

Partai politik sebagian besar tidak mampu menempatkan kader-kader politiknya yang terbaik untuk ikut dalam pemilu legislatif. Penempatan kader selalu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif tertentu tanpa melihat kemampuan dan pendidikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi merasa bingung siapa yang harus dipilihnya dalam pemilu legislatif. Pada posisi seperti ini, money politik menjadi sangat rentan, keterlibatan sebagian masyarakat untuk berpartisipasi politik dalam pemilu bukannya didasarkan atas kesadaran politik melainkan karena uang.



#### 4. Kepentingan sesaat partai politik.

Selama ini parpol hanya mengejar kekuasaan bukannya kepercayaan pada masyarakat. Aktivitas parpol baru terlihat ketika menjelang pemilu dimana selebaran-selebaran, pamflet dan baleho-baleho muncul disana-sini. Anehnya dari seluruh alat peraga tersebut tidak ada satupun yang memberikan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. semuanya selalu mengatakan “pilihlah saya” . peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud.

Untuk menjadi penyeimbang dan pembanding belum optimalnya partai politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif, maka faktor masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting juga untuk di ketahui. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor- faktor antara lain sebagai berikut :

##### 1. Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek

Selama ini masyarakat hanya dimbau untuk datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan dalam pemilu, tidak ada komitmen untuk mengedepankan dan mengugah kesadaran politik masyarakat untuk menanamkan rasa memiliki masyarakat terhadap pemilu.

##### 2. Penyimpangan perilaku wakil rakyat

Wakil-wakil rakyat yang telah terpilih selama ini tidak lagi mengemban fungsinya sebagai wakil rakyat, melainkan menyakiti haari masyarakat itu sendiri. Banyak skandal yang terjadi baik perselingkuhan, tindakan koruptif dan sebagainya menjadi bagian dari kehidupan wakil-wakil rakyat. Partai politik yang seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap wakil-wakilnya yang ada di

lembaga perwakilan rakyat ternyata melindungi dan kerap menutupi perilaku tersebut.

3. Tidak ada manfaat langsung dari pemilu

Pemilu merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan peralihan kekuasaan secara sah. Namun kegiatan pemilu tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Contoh sangat sederhananya adalah penggangguran. Pemilu yang diselenggarakan ternyata tidak mampu memberi pengharapan dan kehidupan yang wajar bagi masyarakat. Penggangguran terus tumbuh seiring dengan pemilu itu sendiri.

4. Pemilu adalah hak bukannya kewajiban.

Hak dalam ilmu hukum adalah peranan seseorang yang mempunyai sifat fakultatif. Artinya boleh dilaksanakan boleh juga tidak dilaksanakan. Untuk melaksanakan hak ini maka kepada individu diberikan perlindungan agar setiap individu bebas untuk melaksanakan haknya atau tidak. Jika kita kaitkan dengan “hak memilih” maka itu berarti setiap individu bebas untuk memilih atau tidak memilih. Setiap individu bebas untuk memilih pilihannya apa yang dia dambakan dan bebas untuk tidak memilih satu pun pilihannya. Dalam undang-undang yang berlaku sekarang, memilih adalah hak, itu berarti tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak menggunakan hak tersebut. Pada kondisi seperti ini maka tidak ada satupun lembaga yang dapat memaksakan kehendaknya kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu legislatif. Oleh karena itu menggugah kesadaran menjadi elemen yang terpenting bagi parpol.

**B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi politik masyarakat di Kalimantan Barat.**

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih dalam pemilu yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi

menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya partai politik berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkembangkan secara aktif partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Khusus di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : **Pertama**; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu itu konsolidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif. **Kedua**; pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

Kenyataan ini jelas tidak banyak berpengaruh bagi pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kesadaran politik masyarakat yang terbangun selama ini meskipun dengan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam pemilu legislatif bukannya hasil kerja dari partai politik melainkan karena kesadaran masyarakat itu sendiri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pentingnya Partisipasi politik Masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasinya saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan. Namun, kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil evaluasi Pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menurun. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi golongan putih (golput) dalam Pemilu. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan mengapa partai politik belum optimal dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilu legislatif dilaksanakan: a). egosentris dan arogansi partai politik. b), pendidikan politik yang tidak memadai. c). Rekrutmen politik yang tidak tepat. d). Kepentingan sesaat partai politik. Berdasarkan hasil-hasil survei yang ada diketahui bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu legislatif disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut : a). Masyarakat dijadikan obyek bukan subyek. b). Penyimpangan perilaku wakil rakyat. c). Tidak ada manfaat langsung dari pemilu. d). Pemilu adalah hak bukannya kewajiban.
2. di Kalimantan Barat tampaknya tidak ada gerakan-gerakan secara signifikan yang menyentuh secara langsung kesadaran emosional dan kesadaran politik agar pemilu legislatif menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai politik tidak mempunyai visi dan strategi yang jelas dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kebanyakan partai politik pusat yang ada di daerah Kalimantan Barat hanya melakukan 2(dua) hal : **Pertama**; partai politik hanya disibukkan dengan kegiatan partai sendiri, baik itu konsolidasi dan penyelesaian konflik intern dalam tubuh partai serta penentuan caleg menjelang pemilu legislatif.

**Kedua;** pembekalan-pembekalan terhadap kader-kadernya ditujukan untuk kepentingan sendiri dan partai untuk mendulang sebanyak-banyaknya suara dan perolehan kursi di lembaga perwakilan dimana masyarakat dijadikan obyek semata-mata.

B. Saran.

1. partai politik harus secara terstruktur memberikan edukasi politik bagi masyarakat, dengan cara pendekatan-pendekatan langsung ataupun melalui penyuluhan-penyuluhan agar terbangun kedekatan emosional tidak saja dengan partai melainkan pemilu legislatif itu sendiri.
2. partai politik lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan partai, sehingga kekuasaan yang diraih diperuntukan bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: PSHTN UI, 2005.

Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan pada Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Denpasar 14-18 Juli 2003

Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002

Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003

A.S.S. Tambunan, *Pemilu Di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*, Bandung; Bina Cipta, 2001

Burns, et.al, *the private Roots of Public Action Gender, Quality and Political Participation*, England: Harvard University Press, 2001, diakses tgl 15 desember 2012

Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Bachsar Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung; Alumni 1985

Bagir Manan, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta; Makalah 1994

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta; Gama Media 1989

Burhan Djabir Magenda, *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Proses Integrasi Nasional*, (Makalah) Pidato Ilmiah Pada APDN Mataram, 1986.

Carl J. Friedrich, *Constitution Government and Democracy: The Theory and Practice In Europe Of Citizens More or Less Organized*, Blaisdell Publishing Company 1967.

Deliar Noer, *Gerakan Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Jakarta: Angkasa Raya, 1992

Djokosoetono, *Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Alrasid, Edisi Revisi Jakarta: Ind-Hill Co, 2006

Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Kedua, Yogyakarta; Liberty, 2002

Daniel Dhakidae, "Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-patahan Sejarah," dalam *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999

Daniel Dhakidae, "Partai-partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi Dalam Patahan-patahan Sejarah," dalam *Partai-partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Jakarta: Kompas, 1999

Etin Nurhaetin, *Analisis Penurunan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2004 di Provinsi DKI Jakarta*, Tesis Magister, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2005

Eep Saefullah, *Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia 1997

Eric Barendt, 1998, *An Introduction to Constitutional Law*, Oxford University Press, First Publication

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962

Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1993

Garner, Bryan A., (Ed), *Black Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group St. Paul, Minn, 1999

G. McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press 1954; Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 38-42; M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Dharmono Hardjowidjono), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung Penerbit Nusamedia, 2006

Harmaily Ibrahim dan Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI, Jakarta : 1978.

Hari Murti KI, kamus Lingustik, Jakarta Gramedia, 1955.

Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan*, Jakarta ;Departemen Penerangan 1962

-----, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Cetakan Keenam, Jakarta: Aksara Baru 1987

Jimly Asshiddhiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, FH UI, 2004.

----- , *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*

----- , *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dimuat dalam *Jurnal Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004.

----- , *Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

----- , *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta ; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

----- , *Konsolidasi Naskah 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Yogyakarta ;Pusat Studi HTN FH UII, ,2002

Joenirto, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara Jakarta*; Renike Cipta, 1990

J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989

Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Sosial (perjanjian Sosial)*, Jakarta: VisiMedia, 2007.

Koentjoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung, Eresco, 1987

Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies*, Alih Bahasa Sahat simamora, Ideologi Politik Kontempore, Jakrta: Bina Aksara, 1986.

Meriam Budirjo, *Dasar dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia, 1982.

-----, *Demokrasi di Indoenesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Raja Grafindo Persada, 1996

-----, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta; yayasan Obor indonesia, 1998.

M. Rusli Krim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, yogyakarta; Tiara Wacana, 1991

Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959

Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI, Jakarta: Gramedia, 1989.

M. Ryas Rasyid, *Pembaharuan Politik Nasional, Implikasi Undang-undang Baru Bidang Politik Terhadap Pembinaan Stabilitas dan Partisipasi*, Pidato Wisuda Sarjana IIP ke XIII, Jakarta, 1985



- N. Satria Abdi, *Bahan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, 1999.
- O' Donnel dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi; Rangkuman Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Parulian Donald, *Mengugat Pemilu Jakarta*; Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Pipit R. Kartawidjaja dan Mulyana W. Kusumah, *Kisah Mini Sistem Kepartaian*, Closs, 2003
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Rajagrafindo, 2006
- RM Sunardi, *Teori Ketahanan Nasional*, Jakarta: Hastanas, 1997
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, 1992.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawai Pers, 2001.
- Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama 1997
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta; Liberty 1993
- Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung; Alumni 1987
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung : Alumni, 2006
- S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4 – 1997
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005
- Sjahrudin Rasul, *Tinjauan Yuridis Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia (Studi Kasus Korupsi di Indonesia Dalam Era Orde Baru)*, Disertasi Pascasarjana Unpad, Bandung 2000
- SB Yudhoyono, *menitik beratkan reformasi sebagai suatu proses perubahan yang berkesinambungan tetapi tetap memiliki prioritas yang pasti. Sekaligus harus mampu dikendalikan karena reformasi berbeda dengan revolusi. SB Yudhoyono, ABRI Profesional dan Dedikatif*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES, 1986

Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka”, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djakarta: Panitia Penrebit Dibawah Bendera Revolusi 1965

Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta; Bulan Bintang 1992 .

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010

Umaidi Radi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta: Integrita Perss, 1984

Ulf Budi Setiyono dan Bonie Triyana (penyunting), “Amanat PJM Soekarno di Hadapan Para Pemimpin dari 7 Partai Politik di Guest House Istana Presiden, Jakarta 27 Oktober 1965”, *Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden Soekarno, 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara*, Yogyakarta: Ombak 2005

Umaidi Radi, *Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Semasa 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta Integritas Press, 1984

Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta: Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, 2003

Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, London: Steven & Son Limited, 1960

Yesmil Anwar&Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana* Jakarta : Grasindo, 2006

Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews (Ed), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Cetakan ke 5, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988..

### **Peraturan Perundangan**

UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik